

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil yang diterima, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu instansi. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu instansi. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi manajemen.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Upaya yang harus dilakukan serta dikembangkan yaitu prinsip tata kelola keuangan. Untuk dapat menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik, maka diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku.

Dalam laporan keuangan adanya laporan keuangan yang dianggap baik maupun yang dianggap buruk. Laporan keuangan yang dianggap baik adalah laporan yang disusun dengan teliti, akurat, dan menggambarkan dengan jelas kondisi keuangan suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Sedangkan laporan keuangan dianggap buruk adalah jika terdapat defisit anggaran yang besar, utang yang meningkat secara signifikan, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, adanya dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana publik,

atau tidak adanya langkah kongkret yang diambil untuk mengatasi masalah keuangan yang ada. Laporan keuangan yang buruk dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah, serta dapat memperburuk kondisi keuangan pemerintah di masa depan.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi. Laporan keuangan harus memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders agar terhindar dari kebiasaan karena kesalahan atas pengelolaan keuangan, baik itu berupa kesalahan atas pencatatan maupun penyelenggaraan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan.

Setiap instansi memiliki tujuan khusus yang hendak dicapai. Kinerja instansi tercermin dari laporan keuangan yang disusun setiap tahun. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan refleksi atau bagian dari kinerja organisasi publik. Dalam mewujudkan kinerja tersebut, diperlukan pegawai yang memiliki pengendalian akuntansi yang tinggi, dan memiliki kompetensi yang baik, serta menerapkan hal-hal yang menuju pemerintahan yang baik.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja nonkeuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat

laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang penting dalam mengukur dan melaporkan kinerja keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi nirlaba, atau entitas pemerintah. Beberapa pengaruh laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja:

1. **Transparansi**, Laporan keuangan yang disusun dengan baik memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan suatu entitas.
2. **Pertanggungjawaban**, Laporan keuangan membantu dalam menetapkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dan aset perusahaan yang efisien dan efektif.
3. **Evaluasi Kinerja**, Laporan keuangan memungkinkan evaluasi kinerja yang objektif.
4. **Keputusan Manajerial**, Laporan keuangan menyediakan informasi penting bagi manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
5. **Kepercayaan Stakeholder**, Laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya meningkatkan kepercayaan dari para stakeholder, termasuk pemegang saham, investor, kreditor, dan pihak berwenang.

Secara keseluruhan, laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam menjaga akuntabilitas kinerja suatu entitas dengan menyediakan

informasi yang relevan, transparan, dan dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh dari kualitas laporan keuangan bagi teknis akuntabilitas kinerja Setdako Padang Panjang, oleh karena itu laporan ini berjudul “ **Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang** ”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang?
2. Apakah kualitas laporan keuangan yang digunakan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis teliti di atas maka ada beberapa tujuan penulisan yaitu:

1. Agar mengetahui bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang digunakan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah terlaksana dengan baik yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## 1.4 Metode Penulisan

### 1. Studi Keperpustakaan

Memperoleh informasi dengan mencari, mengumpulkan dan mendapatkan berbagai referensi bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

### 2. Studi Lapangan

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari observasi dan wawancara dengan pejabat atau karyawan pada instansi terkait.

#### b) Data Sekunder

Data yang memuat berupa laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan diperoleh dari instansi terkait.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Untuk menjalankan kegiatan magang menetapkan di Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang berlokasi di Jl. Sutan Syahrir No. 178, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat . Kegiatan ini dilakukan selama 40 hari kerja yang terhitung dimulai pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari delapan sub bab yang menjelaskan dan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, tempat dan

waktu magang dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini membahas tentang pengertian, pembahasan, serta tujuan aspek yang ada, serta jawaban sementara dari semua rumusan masalah yang telah dijabarkan melalui latar belakang masalah dari tujuan tugas akhir ini.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Pada bab ini memberikan mengenai profil lembaga atau instansi yang meliputi latar belakang, tujuan, lokasi, status serta struktur dari instansi tersebut.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai uraian lebih lanjut dan pembahasan mengenai hasil kegiatan magang yang menjelaskan tentang “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kantor Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang”.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan masalah serta saran yang dianggap penting sebagai bahan dasar pertimbangan untuk perubahan dan perbaikan dilain waktu dan sebagai penambah masukan untuk lebih baik lagi kedepannya.